

---

**FAN-IITTS PUBLICATION**

Alor, Flores, Lembata, Rote, Sabu, Sumba, Timor

***NO LOGO***

*Journal of NTT Studies*

Journal of NTT  
Studies

---

**2 (2) (2010) 131-139**

**ISSN: 20856504**

**VIEWPOINTS**

**Pembangunan Bukan Kuburan Massal**

Dominggus Elcid Li

(Universitas Birmingham, Co-moderator Forum Academia NTT)

Email correspondence: elcidli at yahoo.com

Acknowledgement: Tulisan bagian pertama ini pernah dipublikasikan di Harian Pos Kupang, 19 Januari 2011, sedangkan bagian kedua dipublikasikan di harian yang sama, 20 Januari 2011.

**1. Pendahuluan**

KETIKA kematian rakyat bukan menjadi persoalan, lantas untuk siapa sebenarnya kue pembangunan (baca: tambang) itu? Ketika kematian hanya sekadar menjadi berita di koran dan dilupakan, masihkah ada idealisme di balik program kerja para pejabat pemerintah? Jika penderitaan dan kematian yang sekarang di depan mata saja tidak dianggap, apakah masih perlu berdebat soal hidup sejahtera karena tambang di masa depan, sambil menghitung berapa keuntungan yang mungkin diperoleh?

Paradoks pembangunan di NTT ini tak hanya tercermin dari sekian pertanyaan menggantung, tetapi dari skema logika praktek pembangunan. Kehadiran investor tambang sebagai upaya mempercepat pertumbuhan (*growth*) dan/atau pembangunan (*development*) ekonomi di NTT, tetap dipahami dalam logika ekonomi subsisten. Jika

dulu warga di pedalaman menjual satu ikat kayu bakar kepada pedagang pasar, kini mereka menjual sekarung 'batu mangan' untuk para pengumpul. Setelah digali di kebun, 'batu mangan' diletakkan di halaman rumah di samping kayu api. 'Batu mangan' dalam perdagangan saat ini hanya diletakkan dalam posisi substitusi hasil hutan lain seperti kayu bakar, asam, dan cendana.

## **2. Desentralisasi untuk Siapa?**

Dalam logika subsisten para petani yang beralih menjadi pengumpul batu tenaganya tidak dihitung, dan keselamatannya bukan menjadi tanggung jawab siapa pun. Hubungan para investor dengan para penggali tidak diatur dalam kontrak kerja, tetapi ada dalam 'hubungan dua lapis' yang melibatkan pengusaha perantara maupun pemda setempat. Para pengumpul pun tidak berhubungan langsung dengan investor, tetapi umumnya berhubungan langsung dengan makelar. Kelompok perantara ini sendiri terdiri dari: tuan tanah, pengusaha lokal, politisi setempat, pejabat setempat, petugas keamanan, hingga para pensiunan.

Di Timor Barat, dalam satu tahun terakhir, 'tercatat' 30 orang petani yang beralih menjadi pencari batu mangan tewas tertimbun dalam lubang galian, dan Debora Ponu Karu merupakan korban dua bulan lalu (*Pos Kupang*, 27 November 2010). Tubuh kaku di ruang tamu yang digali dari timbunan tanah tidak mampu dibaca para elite NTT sebagai tragedi kemiskinan kita dan meletakkannya sebagai tanggung jawab politik terhadap rakyat. Saat ini tercatat 300 Kuasa Penambangan (KP) ilegal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam catatan Asosiasi Pertambangan Indonesia (*Timor Express*, 23 Oktober 2010). Dalil izin tambang tidak dikeluarkan pemda pun tidak seluruhnya benar, karena ini diatur dalam Keppres No. 34 tahun 2003 Pasal 2 Ayat 2 yang kontroversial. Sebab pelimpahan otoritas itu tidak mengantisipasi penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi di era desentralisasi. Dengan tidak adanya hubungan antara rakyat dan partai politik pasca pemilu, maka semakin mustahil suara rakyat dapat didengarkan.

Desentralisasi pemerintahan sebagai paket liberalisasi ekonomi pasca Soeharto memang memberikan peluang kepada pejabat pemerintah daerah untuk berhubungan langsung dengan para investor. Persoalannya, dalam skema desentralisasi posisi rakyat tetap tidak mendapatkan kajian memadai. Entah itu terkait dengan seberapa jauh suara mereka dengan instrumen politik, hingga keselamatan kerja dalam mencari hidup.

Retorika pengentasan kemiskinan dalam perencanaan ekonomi umumnya tetap tinggal sebagai konsep abstrak, tanpa mampu menemukan bentuk riil-nya. Contohnya, dalam ingatan kolektif, busung lapar merupakan logo utama kemiskinan NTT. Dalam skema pembangunan, pengentasan kemiskinan merupakan alasan moral para pembuat kebijakan.

Anehnya, di dalam praktek antara konsep kemiskinan dan orang miskin dianggap tidak berhubungan. Perdebatan soal kemiskinan dapat menjadi bahan seminar menarik bagi para ahli perencana pembangunan, tetapi sebaliknya kematian orang miskin dalam proses pembangunan merupakan kesalahan orang miskin sendiri. Kematian orang miskin hanya persoalan keteledoran, dan tidak terkait dari penerapan rencana pembangunan dan bagian dari pilihan program pembangunan pemerintah daerah.

### **3. Rakyat dalam Kuburan Angka**

Di era otonomi daerah proses transaksi ekonomi memang dibikin selancar mungkin. Mulai dari proses perizinan hingga proses pengapalan bahan tambang, tetapi kedudukan rakyat sebagai warga negara diabaikan.

Pemerintah daerah di NTT, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten di Timor Barat, lebih menempatkan diri sebagai 'rekanan' para investor dibandingkan sebagai penyelenggara negara. Sebagai 'rekanan', pemerintah daerah wajib memperlancar kegiatan ekonomi, sebaliknya sebagai aparat negara keselamatan rakyat merupakan tanggung jawabnya.

Tak heran juga jika Gubernur NTT lebih fokus pada penetapan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTT sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur dalam hal perizinan pengantarpulauan 70 peti kemas mangan (*Kompas*, 9 September 2010). Untuk kasus ini, Gubernur NTT meminta agar dilakukan pembelaan secara resmi oleh pemerintah daerah. Ironisnya, kematian para pencari batu mangan tidak mendapat pembelaan siapa pun. Entah kenapa kematian mereka kurang bernilai jika dibandingkan dengan pemasukan kas negara sebesar Rp 1,2 miliar dari tambang mangan (*Pos Kupang*, 5 Oktober 2010).

Kehadiran para investor dari Asia Timur dan Tenggara memang berhasil membuat para petani beralih menjadi pencari batu. Pembodohan kepada para pengumpul batu mangan, di antaranya ditandai dengan hanya mengurung mereka dalam logika cash flow. Padahal, jangankan soal tambang mangan di abad 21, di era liberal perkebunan kopi di tahun 1850-an, ketika para pekerja ditawarkan antara menjadi tuan atas kebun kopi dan makan dari hasil penjualan kopi, mereka tetap memilih untuk menjadi pekerja di kebun kopi agar bisa digaji. Di sisi ini uang bukan lagi sekadar alat tukar, tapi sudah menjadi tujuan. Di era abad 21, tepatnya di era krisis *financial capitalism*, saat uang bukan lagi sekadar alat tukar, tapi menjadi bagian dari komoditas perdagangan, yang dialami Indonesia di tahun 1997 dengan *currency crisis*, yang menjatuhkan rezim Orde Baru tidak dikenal.

Negara di Indonesia dianggap tidak ada. Rakyat yang berdaulat juga tidak. Negara hanya dimengerti sebagai idiom semata, dan tidak dikenal apa pengertiannya. Perbedaan antara

'pemerintah' (*government*) dan negara (*state*) pun tidak dimengerti. Tanah negara dianggap sama dengan tanah pemerintah, sehingga pemerintah berhak memberikan tanah negara kepada investor. Siklus sejarah memang berulang. Jika tahun 1870 pemerintah Hindia Belanda (*Netherland East Indies*), meloloskan hak atas tanah untuk dipakai oleh para kapitalis (baca: investor), maka tahun 2010 pemda kabupaten berhak menyerahkan tanah negara kepada investor.

Kritik terhadap logika subsisten penambangan mangan di Timor Barat, senantiasa dijawab para ekonom dengan 'yang penting ada uang'. Doktrin yang tak hanya disebarkan oleh para makelar tambang, tetapi juga menjadi bahasa resmi pemerintah daerah. Kritik terhadap tambang di NTT dijawab sekenanya, "Kenapa pakai barang-barang bermaterikan bahan tambang jika tolak tambang?" Aneh, kompleksnya persoalan manusia di NTT analoginya hanya dianggap sepadan dengan pilihan vegetarian atau non vegetarian. Padahal ini bukan cuma soal ada uang, tapi 'nilai uang', bahkan kesatuan manusia dan alam yang menjadi inti suara keprihatinan dari gereja.

Negara-negara di Asia Timur yang masuk dalam era industri pasca PD II kini merupakan negara investor utama. Wajar jika rombongan pencari investor bertandang ke negeri tirai bambu. Kemampuan RRC mendirikan negara, dan menjadi pemain utama dalam G2, tidak pernah dipelajari. Para ekonom Indonesia maupun pengikutnya, cuma mengerti di sana ada uang (baca: investor). Sebaliknya proses bernegara di keempat negara Asia Timur ini tidak dipahami.

Dalam kajian Wertheim (1997), yang membandingkan antara Indonesia dan RRC, RRC mulai membangun pasca 1949 dengan fokus pada persoalan pangan. Dalam skema itu, persoalan kelaparan merupakan prioritas utama sebelum beranjak ke ranah yang lain. Pasca transisi kepemimpinan ke tangan Deng Xiao Ping, ia pun membuka daerah pinggiran sebagai 'ajang uji coba pasar'. Itu pun dilakukan bertahap di tahun 1980-an. Proses pembangunan adalah bagian dari strategi, jadi bukan karena kalap dan ada dalam posisi ditawan. Formasi strategi yang lain bisa dibaca dari sejarah Korsel, Jepang dan Taiwan dalam sistem pemerintahan dan politik yang berbeda.

#### **4. 2011: *laissez faire*?**

Jika perkembangan *financial capitalism* ini tidak dipahami, bahkan hanya dengan bekal semboyan 'yang penting ada uang' dan buta terhadap kematian, maka tragedi ini memang akan makin panjang. Sebab bukan saja 'uang mungkin kehilangan nilai', kemanusiaan pun telah hilang, apalagi kata-kata.

Tak heran kalau semakin sarat informasi, tak berarti 'pengertian' makin ada, sebaliknya semakin kosong. Praktek ekonomi *laissez faire*, memang mengandaikan negara tidak

mengintervensi transaksi pasar. Jadi jika kematian saat ini saja tidak dipedulikan, maka tipis kemungkinan bahwa siapa pun yang terlibat masih sempat berpikir tentang kehidupan generasi mendatang dengan cara melestarikan lingkungan. Jika jarak pandang tak lebih dari angka dan lembaran duit memang horizon pengetahuan pun semakin tipis.

Menunggu para pembuat keputusan yang mampu menganalisis lebih jauh dari sekadar sirkulasi uang, dan tidak terlepas dari manusia mungkin itulah salah satu harapan. Sebab variabel yang dipakai untuk menghitung pun bukan hafalan, dan tidak terlepas dari perkembangan manusia di tempat tumbuhnya ilmu ekonomi. Selain itu, warga negara tidak sama artinya dengan kumpulan ahli. Sehingga watak ilmu pengetahuan seharusnya tidak menjadi otoriter.

Sederhananya, konsep pembangunan dan pertumbuhan, tidak mungkin diukur oleh manusia yang terkubur. Pembangunan bukan kuburan massal.

## **5. Tambang, Kartel Politik, dan Otoritarianisme Pasar**

DESENTRALISASI, pasca rezim Orde Baru, yang kita tengah hadapi bukanlah dekonstruksi ruang politik di mana rakyat semakin mendapatkan peluang dan ruang bicara, tetapi desentralisasi sebagai instrumen pemudahan akses terhadap hasil-hasil alam sebagai bagian dari kebutuhan industri, tanpa diimbangi dengan hak berpolitik rakyat. Suara rakyat 'dibonsai'.

Kedudukan partai politik sebagai kanal untuk rakyat pun tidak bisa terlalu diharapkan. Politik partai saat ini tetap ada dalam sistem upeti dan terjebak dalam kartel politik (Supriatma, 2009). Sistem perwakilan model ini menempatkan kepentingan rakyat hanya sekadar pada 'niat baik figur terpilih'. Habis pemilu kada, putus pula hubungan. Relasi politik malah di balik menjadi 'kebaikan hati orang terpilih'.

Di sisi ini desentralisasi justru menjadi jerat kolonialisme internal. Di satu sisi para anggota legislatif 'ditekan' kartel politik Jakarta, di sisi lain oportunistik politik tercipta dalam persaingan pasar, dan para pejabat pemerintah daerah fungsinya berubah menjadi tenaga pemasaran perusahaan tambang, dan tak jarang wataknya berubah menjadi mafia.

## **6. Suara Rakyat, Siapa Dengar?**

Praktek penjajahan ini semakin mirip jika kita mengingat bahwa di era penjajahan Belanda, Pemerintah Belanda tidak perlu berurusan langsung dengan populasi yang ditaklukkan. Jika kini posisi 'ningrat' dalam masyarakat dipegang oleh para pejabat

pemerintah daerah maupun para tuan tanah, maka skema kolonialisme dalam langgam indirect rule tetap terulang. Serupa dengan aksi Belanda yang melakukan perjanjian sepihak dengan ratusan penguasa lokal dari Malaka hingga Ternate di abad 17 dan 18 (Alatas, 1977: 196).

Persoalan tambang yang masih merupakan perdebatan publik tidak menjadi persoalan serius para kepala daerah. Meskipun sikap politik publik belum lagi didengarkan, tanah kita sudah ditawarkan terbuka. Contoh kasus tambang di Manggarai, saat Uskup ditolak untuk masuk ke tanah air yang dijadikan areal tambang merupakan bukti penjajahan (*Timor Express*, 20 November 2010). Konsep tanah air tidak dikenal, sebaliknya ini hanya 'izin tambang Departemen Pertambangan'. Sehingga relasi antara rakyat setempat dengan pemerintah pusat serupa dengan relasi pemerintahan kolonial. Kedaulatan rakyat tidak ada.

Argumentasi penjaga gerbang tidak sepenuhnya benar jika membaca ulang Keppres No.34 Tahun 2003 Pasal 2 (yang juga tak luput dari cacat hukum). Itu pun bisa ditelusuri dari TAP MPR No. IX tahun 2001 yang memuat hal penting dalam Pasal 6 Ayat 2 mengenai arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kedua produk hukum 'reformasi' ini tidak melihat bahwa produk hukum pun merupakan strategi negara, sehingga tak mampu mengantisipasi dalam prakteknya strategi pembangunan satu paket dengan strategi dagang dan ada dalam genggaman pelaku pasar. Hal yang terbaca dalam kedua produk hukum ini adalah strategi perdagangan yang lekat dengan pragmatisme pasar. Kenapa sistem kolonialisme bisa berulang setelah lewat dari satu abad pun tidak dimengerti? Penyelewengan ini bisa jelas dibaca dalam UU No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, dan dibandingkan dengan sekian rencana amandemen yang disuarakan anggota DPR maupun menteri (Vivanews, 7 Januari 2010).

Singkatnya, strategi bernegara tidak dimengerti dengan menganggap semua produk hukum harus takluk dalam mekanisme pasar. Pertanyaannya, lantas di mana kepastian hukum yang dimaksud jika seluruh aturan hukum dibikin dalam kendali pasar? Kedua produk hukum 'reformasi', maupun penggagas amandemen, tidak melihat hal pertama yang dicabut UU No.5 Tahun 1960, yakni *Agrarische Wet* yang dikeluarkan diterbitkan *Minister van koloniën*, Engelbertus de Wall. Hantu neokolonialisme yang cuma jadi jargon di tahun 1960-an menemukan bentuk nyatanya sekarang, pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Tidak heran kalau kedua produk hukum terkait persoalan agraria memang tidak mampu mengantisipasi perulangan liberalisasi pasar.

Pembedaan antara pemerintah dan negara, menjadi lebih jelas, ketika ternyata 'peralihan bupati' (kepala pemerintahan), tidak langsung mampu menganulir 'perkara tambang' yang diputuskan bupati sebelumnya. Perkara orang banyak yang diputuskan secara elitis, memang menjelaskan bahwa keputusan bupati sebagai kepala pemerintahan tidak serta

merta mewakili aspirasi warga negara. Singkatnya, di tengah mahalunya politik pemilu kada, pemilihan kepala daerah pun tidak luput dari permainan pasar.

Dalam tekanan pasar, suara rakyat mustahil bisa didengar. Angka 30 orang tewas dianggap bukan soal besar. Sebaliknya protes pengusaha karena barangnya ditahan menjadi urusan serius pemerintah. Dengan demikian siapa sebenarnya konstituen para pemenang pemilu kada pun menjadi lebih jelas. Para pemodal lah yang menjadi *stakeholder* atau pendukung utama gubernur atau bupati maupun para anggota DPRD, dan bukan rakyat. Bagaimana mungkin kita bisa bicara soal legislasi, ketika para anggota legislatif, bahkan eksekutif pun juga menjadi pelaku pasar aktif beserta seluruh kerabatnya?

## **7. Retorika Pembangunan vs Kematian Berantai**

Di tengah ketidakdilan semacam ini, apakah mungkin kita meminta gereja hanya berada di tengah sebagai mediator? Jika uang turut berbicara, apakah mungkin masih berlaku asumsi bahwa ada ada sekian subyek setara untuk dimediasi? Ketika sirkulasi uang yang menjadi hukum, apakah mungkin ada ruang berargumentasi?

Apa masih mungkin akal sehat dipakai? Contohnya, dalam tabel kimia, mangan (Mn) ditandai dengan angka atom nomor 25. Di Chili 33 orang yang terjebak dalam tambang sedalam 720 meter aparat negara merasa perlu dan penting bekerja sama dengan NASA dalam proses penyelamatan. Di Timor Barat, 30 pencari batu mangan yang mati terkubur dalam lubang kurang dari 10 meter dianggap biasa. Di harian lokal, setiap bulan berita kematian pencari batu mangan adalah pasti, namun sunyi dari perhatian negara. Berkaca pada kenyataan ini, perkara *green politics* maupun 'tambang sehat' untuk saat ini masih amat jauh untuk dijadikan perdebatan.

Jika angka 30 dalam deret hitung saja tidak dimengerti, bagaimana mungkin bisa memahami angka atom No 25? Apalagi untuk diajak berhitung tentang posisi NTT dalam sistem kapitalisme Asia Timur, yang menempatkan NTT sebagai lokasi sasaran pencarian bahan mentah?

Beberapa waktu lalu Forum Academia NTT mengadakan 'pemungutan suara' untuk menyatakan sikap politik terhadap perkara tambang di NTT. Berikut ini isi petisi: *Kami dengan ini menyatakan menolak keberadaan tambang di Nusa Tenggara Timur. Sebagai warga negara yang berdaulat di atas tanah air, kami berpendapat agar tambang tidak dijadikan opsi pembangunan saat ini. Maka kami meminta agar gubernur selaku kepala Pemerintahan Provinsi NTT, maupun para bupati di NTT untuk mencabut seluruh izin tambang yang sudah dikeluarkan.*

Petisi ini merupakan catatan penting untuk para kepala pemerintahan. Dalam setiap periode kepemimpinan para kepala daerah menuliskan memori kerja. Satu tradisi warisan para administrateur Belanda yang terkenal rapi catatannya. Kliping berita kematian sudah harus menjadi bagian dari referensi para pemimpin wilayah.

## **8. Politik Potong Kepala**

Kematian rakyat beruntun dan tidak dipedulikan menegaskan bahwa rakyat sebagai konsep bernegara masih sekadar retorika. Rakyat bukanlah pelengkap penderita. Sekadar satu kata wajib hadir dalam pidato harian yang setiap saat bisa terpelanting dari bibir, terbangun sejenak saat pemilu kada, sebelum tidur panjang. Kadang muncul kala mengigau atau berfantasi soal 'pembangunan', tetapi pasti dilupakan ketika berkelahi soal pembagian jatah meloloskan proyek pembangunan. Padahal, kematian rakyat dalam lubang tambang merupakan kekeliruan strategi pembangunan itu sendiri maupun strategi bernegara pasca pemerintahan rezim militer.

Tragedi kolonialisme dalam Max Havelaar (1859), yang ditulis oleh Multatuli, pseudonim dari Eduard Douwes Dekker, kisahnya tidak jauh berbeda dengan deret kematian tambang mangan di NTT. Kisah Saiiah dan Adinda, tidak jauh lebih tragis dari tragedi kematian tiga perempuan kakak beradik dalam lubang: Filomena Natun (41), Agnes Natun (39), dan Yustina Natun (28), yang terkubur hidup-hidup di Kefamenanu (Pos Kupang, 19 September 2010). Protes utama Multatuli di tahun 1859 adalah 'mengapa Pemerintah Belanda membiarkan warga setempat ditindas oleh para pemimpin inlanders?'

Pembangunan dan kurban adalah satu sejak zaman dulu. Mitos soal 'orang potong kepala' masih kita ingat. Dulu kita 'di-takutkan' bahwa untuk membangun jembatan yang kokoh orang menganggap perlu kepala manusia yang ditanam. Saat ini, kita yang katanya makin moderen, di era pembangunan sudah mengubur 30 orang hidup-hidup. Mengapa kita ada di posisi yang sama?

Pembangunan, dalam era desentralisasi, dikatakan sebagai proses yang memerdekakan jika rakyat semakin tidak bergantung (Sen, 1999). Sedangkan kita pilihan pembangunan di NTT untuk masuk dalam sistem produksi Asia Timur, dilakukan tanpa perhitungan. Korban awal sudah terjadi. Itu pun tidak dipedulikan. Jika deretan kematian telanjang ini pun tidak bisa dilihat, apa mungkin kita masih bisa berharap ada kemampuan pemda beserta anggota legislatif untuk mengantisipasi dampak tambang dalam jangka waktu tertentu? Jika watak para pejabat kita tidak lebih dari kisah anjing berebut tulang, maka

demokrasi, yang dipraktekkan di Indonesia menjadi plutokrasi dan mediakrasi, sinonim dengan *democrazy*.

Tulisan karya Multatuli soal penderitaan para petani kebun kopi menjadi tamparan untuk Pemerintah Hindia Belanda. Kini, meskipun sekian kliping kematian dipajang di surat kabar, tidak ada yang bergerak. Ya, kemiskinan memang menjadi isu penting dalam berbagai aspek pembangunan, kecuali soal orang miskin itu sendiri.

Sayang seribu sayang, tanah air dimakan 'batu badaon'. *Mama, papa, takubur tar ada yang peduli. Rakyat NTT, rakyat yatim piatu.* \*

## 9. Referensi

Alatas, Syed Hussein, *The Myth of the Lazy Native : a Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th century and its Function in the ideology of Colonial Capitalism*, London : Cass, 1977

Lenin, V.I, *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*, Peking: Foreign Press Language, 1975 [1917]

Middelkoop, P., *Curse-Retribution-Enmity: as Data in Natural Religion, Especially in Timor Confronted with the Scripture*, Amsterdam: Jacob van Campen, 1960

Multatuli, *Max Havelaar or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company*, London: Penguin 1987 [1860]

Sen, Amartya, *Development as Freedom*, Oxford: Oxford University Press, 1999.

Supriatma, A Made Tony, *Menguatnya Kartel Politik Para “Bos”*, *Prisma* Vo.28, No.2, Oktober 2009

Wertheim, Wim, *Third world whence and whither? : Protective State versus Aggressive Market*, Amsterdam: Het Spinhuis, 1997